



## Korupsi Dana UPPO

# Juniada Segera Disidangkan

Bangli (Bali Post) -

Berkas perkara kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) pengembangan unit pengolahan pupuk organik (UPPO) di Desa Batur Kintamani dengan tersangka Ketua Kelompok Tani Bina Winangun Nyoman Juniada sudah dinyatakan lengkap alias P21. Lengkapnya berkas ini menandakan kasusnya akan segera disidangkan.

"Iya berkas Juniada sudah lengkap atau P21," kata Kasipidsus Kejari Bangli Bagus Putra seizin Kajari Ida Ayu Retnasari Senin (29/6). Dia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Lengkapnya berkas tersangka Juniada juga disampaikan Kanit Tipikor Polres Bangli Ipda Sang Ketut Maryasa kemarin. Dia mengatakan berkas Juniada dinyatakan P21 pada 23 Juni lalu.

Sebagaimana yang diberi-

takan sebelumnya kasus ini bermula dari adanya dana bansos yang digelontor dari DIPA Kementerian Pertanian melalui Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian tahun 2012. Dana tersebut langsung dikeluarkan oleh pusat kepada kelompok tani Bina Winangun, Banjar Taksu Tengah, Desa Batur yang nilainya mencapai Rp 340 juta. Sesuai petunjuk teknisnya, bantuan tersebut dipergunakan untuk kegiatan pengadaan beberapa item di antaranya sepeda motor roda tiga, kandang koloni, bak fermentasi, rumah kompos dan 35 ekor sapi.

Akan tetapi dalam perjalanan pengelolaannya, dana yang telah mendapat persetujuan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan (P3) Bangli tersebut ternyata menyimpang dari rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK). Penggunaan dana senilai Rp 195 juta ternyata tidak jelas. Kandang koloni dan 35 ekor sapi yang direncanakan dalam program ini sama sekali tidak ada.

Dana yang seharusnya juga dikelola oleh anggota kelompok lainnya justru dikelola sendiri oleh tersangka I Nyoman Juniada yang saat itu bertindak sebagai ketua kelompok tani Bina Winangun. Berdasarkan pengembangan pemeriksaan terhadap tersangka Juniada, polisi juga menemukan adanya fakta keterlibatan tersangka IWS yang saat itu menjabat sebagai Kadis P3.

Menurut polisi mantan Kadis P3 itu diketahui cukup berperan besar dalam kasus tersebut. Dimana dalam pencairan bansos memakai rekomendasi Kadis P3. Hanya saja meski tidak menyertakan lampiran pertanggung jawaban, namun pencairan tetap dilakukan. Saat menjadi Kadis P3, IWS juga diketahui tidak menggunakan kewenangannya sebagai kadis untuk melakukan pengawasan penggunaan dana serta perkembangan program itu hingga akhirnya dana tersebut habis. (kmb40)

Edisi : Selasa, 30 Juni 2015

Hal : 10



Bali Post



## "Blacklist" Rekanan RS Pratama Bupati Geredeg Nilai Desakan Pemprov Tak Berdasar

Amlapura (Bali Post) -

Desakan Pemprov Bali agar Pemkab Karangasem melakukan *blacklist* terhadap pihak rekanan PT Asri Cipta Nata Alam yang mengerjakan gedung RS Pratama, ditanggapi Bupati Karangasem Wayan Geredeg. Bupati Geredeg, Senin (29/6) kemarin, terkesan membela rekanan. Bahkan, dia menilai desakan Pemprov itu tak berdasar dan tidak mungkin dilakukan.

Geredeg mengaku kualitas pengerjaan yang buruk terhadap RS Pratama disebabkan waktu pengerjaan yang singkat dan adanya perubahan desain gedung.

Bupati Geredeg saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap tiga ranperda di gedung dewan, mengaku pembangunan RS Pratama di Banjar Dinas Labuan Sari Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu, tahun lalu cukup banyak mengalami kendala. "Saya saat itu sampai berulang-ulang

turun ke sana. Kalau melihat situasi saat itu, bisa selesai saja rasanya sudah syukur," kata Geredeg terkesan membela pihak rekanan.

Saat itu, waktu pengerjaan cukup singkat atau mepet. Apalagi, dalam situasi waktu pengerjaan yang singkat, juga ada perubahan desain. Awalnya, desain gedung dirancang berlantai dua. Namun, tidak disetujui, sehingga akhirnya dibangun berlantai satu di lahan seluas 1,3 hektar.

Soal permintaan *blacklist* oleh Pemprov Bali, sanksi tersebut tidak semudah itu

dibebankan kepada pihak rekanan. Menurutnya, dasar *blacklist* itu harus ada. Mulai dari adanya teguran tertulis dan lisan, atau melalaikan pekerjaan. Selama pengerjaan, Geredeg menilai pihak rekanan sudah memenuhi pengerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bahkan, saat itu Geredeg mengatakan pengerjaan dilakukan hingga malam hari. Meski demikian, guna menindaklanjuti masalah ini, pihaknya Senin kemarin sudah memanggil Kabag Tata Pemerintahan dan Kadiskes

Karangasem.

Selanjutnya, karena pengerjaannya menggunakan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Pemprov Bali tentu konsekuensinya berada di Pemkab Karangasem. Perbaikan kerusakan saat ini bakal dianggarkan dalam APBD Induk 2016. Sekalian dengan penataan lingkungan jalan dan kebunnya.

Gedung RS Pratama ini terdiri dari satu unit gedung poliklinik, satu unit gedung UGD dan rawat inap serta

beberapa unit lainnya untuk rumah dinas dokter dan petugas medis. Seluruh gedung itu berdiri di atas lahan seluas 1,3 hektar milik Pemprov Bali. Saat dicek, gedung polikliniknya sudah ditemukan

dalam kondisi bocor, plafonnya jebol, pemasangan keramik di bagian dinding juga mengelupas. Demikian juga di unit gedung UGD dan ruang rawat inap. Di tempat ini kondisinya lebih parah lagi, di mana sejumlah plafonnya jebol, hingga tembok sejumlah ruangan retak-retak.

Kondisi ini tentu cukup membahayakan ketika RS Pratama ini beroperasi melayani pasien di Kecamatan Kubu hingga masyarakat Bangli. Hal ini mengindikasikan pengerjaan RS Pratama ini terkesan dibuat asal-asalan.

Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika kecewa dengan kualitas pengerjaan proyek ini yang dinilai buruk. (kmb31)

Edisi : Selasa, 30 Juni 2015

Hal : 15



## 2017, Kantor PDAM Badung "Digusur"

**Mangupura (Bali Post) -**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama akan "digusur" ke gedung baru yang berlokasi di Kabupaten Badung pada 2017 mendatang. Menurut Direktur PDAM Badung I Made Subargayasa, proyek tersebut telah dianggarkan pada APBD Induk 2016. "Sekarang dalam proses penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) maupun APBD induk. Kalau DED, dianggarkan pada APBD Perubahan 2015, sedangkan fisiknya pada APBD Induk 2016. Sehingga, 2017 kantor baru PDAM bisa berdiri," ungkap Subargayasa, Senin (29/6) kemarin.

Menurutnya, gedung baru itu akan dibangun di atas lahan milik Provinsi Bali di Jalan Raya Kapal, tepatnya di depan RSUD Badung. "Gedung nantinya dibangun di tanah milik provinsi yang dimanfaatkan Pemkab Badung untuk Balai Pendidikan," katanya.

Selama ini, dikatakan Subargayasa, PDAM Tirta Mangupura juga memanfaatkan lahan yang disewa hampir 20 tahun untuk lahan parkir dan tempat menyelenggarakan kegiatan. Sebidang tanah yang dimanfaatkan sebagai tempat menggelar aktivitas internal perusahaan ini, terletak di belakang gedung PDAM yang berada di Jalan Bedahulu No. 3 Denpasar. "Kami belum memiliki ruangan yang cukup. Tempat ini pun (lahan parkir-red) PDAM istilahnya masih menyewa, kurang lebih hingga 3 tahun ke depan. Dengan berdirinya nanti (gedung baru-red), kami bisa pindah," sebutnya. (kmb27)

Edisi : Selasa, 30 Juni 2015

Hal : 2



## Terjerat Hukum

# Enam PNS

# Diberhentikan Sementara

**BADAN** Kepegawaian Daerah (BKD) Klungkung menindak tegas sejumlah PNS yang terlibat masalah hukum. Karena untuk di Klungkung sendiri, ada enam PNS di lingkungan Pemkab yang terlibat masalah hukum.

Dari enam orang PNS tersebut, satu orang di antaranya sudah dijatuhi sanksi dengan penurunan pangkat satu tingkat. Sedangkan yang lainnya masih dalam proses. Tapi mereka yang terlibat masalah hukum ini juga sudah diberhentikan sementara dan tidak menerima gaji penuh. Gaji yang mereka terima saat ini hanya 75 persen sambil menunggu kepastian

dari proses hukum.

Kepala BKD Klungkung Komang Susana, Senin (29/6) kemarin tidak menampik ada enam PNS di Klungkung yang terlibat masalah hukum. Hanya saja Komang Susana enggan membeberkan identitas para PNS yang terlibat masalah hukum. "Sudah ada satu PNS yang diberikan sanksi berupa penurunan pangkat karena kasusnya sudah ada keputusan dari pengadilan. Yang bersangkutan informasinya sudah divonis satu tahun. Jadi kita berikan sanksi penurunan pangkat," katanya.

Komang Susana mengatakan lima PNS lainnya masih diproses. "Mereka sudah

diberhentikan sementara dan tidak menerima gaji penuh," jelasnya. Menurutnya selama menjalani proses hukum kelimanya hanya diberikan gaji hanya 75 persen. "Jika nanti keputusan pengadilan menyatakan mereka tidak bersalah, sisa gajinya dibayarkan kembali," jelasnya.

Sementara itu informasi di lapangan, keenam PNS yang terlibat masalah hukum ini di antaranya ada mantan Sekda Ketut Janapria, mantan Kadis DKP Nyoman Rahayu, mantan Kadis PU AA Ngu-rah Agung, yang terlibat masalah kasus dugaan korupsi pengadaan lahan dermaga. Satu PNS lagi ber-

nama Nyoman Simpul yang terlibat kasus penipuan pegawai kontrak. Simpul disebut-sebut telah divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim.

Dua PNS lainnya yang terlibat masalah hukum yakni mantan Kepala SMPN 1 Nusa Penida Wayan Utama dan bendahara sekolah, IB Darma Putra. Keduanya terlibat kasus korupsi dana BOS sekolah sekitar Rp 638 juta. Keduanya juga telah diberhentikan sementara. "Kalau vonisnya di atas dua tahun, mereka akan diberhentikan. Kalau di bawah dua tahun sanksinya bisa penurunan pangkat atau lainnya sesuai aturan," tandas Komang Susana. (kmb)



Komang Susana



Wabup Minta

# Izin Toko Modern Berjaringan di Gilimanuk Dicabut

Negara (Bali Post) -

Adanya izin pembangunan toko modern berjaringan di Gilimanuk yang diduga menggunakan izin dari kecamatan membuat pemerintah daerah kecolongan. Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan memerintahkan agar izin dari kecamatan untuk usaha mikro kecil itu dicabut. Sebab, izin tersebut tidak sesuai dengan fakta toko yang dibangun. Sementara Komisi B DPRD Jembrana juga mengaku heran, hingga izin bisa turun untuk toko tersebut.

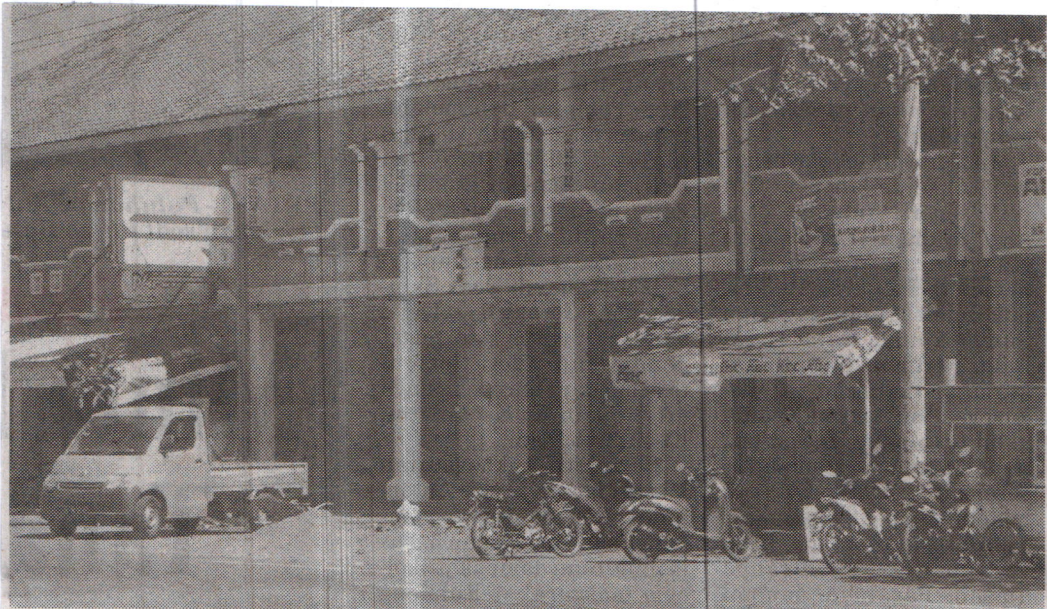
Wabup Kembang ditemui Senin (29/6) kemarin mengatakan izin tersebut sudah menyalahi dari fisik toko yang dibangun sehingga harus dicabut. "Saya minta dicabut saja, kalau toko modern harus lewat kabupaten tidak hanya di Kecamatan," tegasnya. Selain melalui kabupaten, izin itu harus dengan kajian yang dalam menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) yang ada. Pemerintah berhak mencabut izin tersebut apabila tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Termasuk dengan izin IUTM namun ternyata usaha retail yang modalnya ratusan juta. Pihaknya meminta di kecamatan agar lebih teliti dan rutin melakukan pengecekan agar izin yang dipermudah ke kecamatan itu tidak disalahgunakan.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jembrana I Nyoman S. Kusumayasa, mengaku heran pihak kecamatan bisa mengeluarkan izin itu. Pemerintah Daerah menurutnya kecolongan hingga bisa keluarnya izin tersebut, apalagi sudah memiliki Perda Perlindungan Pasar Tradisional. Komisi B akan mengecek langsung ke lokasi guna melihat kondisi riil toko itu. "Untuk apa kita punya Perda Pemberdayaan Pasar Tradisional, di sana jelas diatur tentang izinnya (toko modern) dan tidak sembarangan," ujar Kusumayasa.

Bila dilihat dari lokasinya yang berada di ruko dekat Pelabuhan Gilimanuk patut harus ditelusuri status tanah tempat berdiri toko itu. Tanah dan bangunan itu



Sambungan - . .



Bali Post/olo

**DIBANGUN - Toko yang diduga toko modern berjaringan mulai dibangun di kompleks ruko Gilimanuk.**

dikontrak atau bagaimana, karena sebelumnya status tanah dan bangunan itu dikelola pemerintah. Dan walaupun benar ada yang mengontrak, tidak boleh diover kontrak. Karena itu, pihaknya heran sampai izin itu bisa keluar.

Berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2010 menurutnya

sangat protektif untuk toko modern berjaringan. Dari pengamatan, toko tersebut sudah hampir 100 persen rampung dengan mengambil dua unit bangunan ruko. Bahkan pohon perindang di depan ruko itu nampak sudah ditebang. Diberitakan sebelumnya, dua toko yang disinyalir toko modern

berjaringan hendak berdiri di dua lokasi di Kecamatan Jembrana dan Melaya. Salah satunya di ruko sebelum masuk Pelabuhan Gilimanuk sudah keluar izin dari Kecamatan Melaya dan mulai pembangunan. Sedangkan permohonan izin di Kecamatan Jembrana ditolak oleh kecamatan. (kmb26)



## Dewan Soroti Penanganan Jembatan Putus di Sidemen

Amlapura (Bali Post) -

Penanganan jembatan kayu di Kecamatan Sidemen, Karangasem dinilai lamban. Hal itu membuat jembatan kayu yang menghubungkan Desa Sidemen dengan Desa Sangkan Gunung itu ambruk setelah dilalui truk bermuatan pasir. Hal itu sangat disayangkan Fraksi NasDem DPRD Karangasem dalam pemandangan umum fraksinya terkait penyampaian tiga ranperda, Senin (29/6) kemarin.

Legislator I Kadek Sujanayasa dari Fraksi NasDem dalam menyikapi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU). Program pembangunan jalan dan jembatan terjadi kegagalan realisasi penyerapan anggaran pada belanja modal pembangunan jembatan yang berlokasi di Kecamatan Sidemen tahun 2014. Dampak dari kejadian itu saat ini justru memperparah keadaan, di mana jembatan yang dimaksud telah ambruk. Kondisi demikian, jelas merugikan masyarakat untuk mendapatkan akses jalan, baik untuk

bidang pelayanan kedinasan, ekonomi maupun kegiatan sosial agama.

"Adakah terobosan yang diambil dalam waktu singkat untuk mengatasi masalah ini. Termasuk kegagalan dalam penyelesaian kegiatan proyek fisik lainnya pada tahun 2014," kata Sujanayasa. Wakil Bupati Karangasem Made Sukerana sebelumnya mengatakan perbaikan tidak bisa dipaksakan tahun ini. Diakui, keberadaan jembatan kayu itu sudah direncanakan untuk diperbaiki tahun 2014 melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus). Namun, ternyata dalam prosesnya mengalami gagal tender. Sehingga tahun ini tidak dianggarkan dan terpaksa dianggarkan pada APBD Induk 2016. Dari perencanaan Dinas PU, rencananya jembatan kayu tersebut bakal diganti dengan pembangunan jembatan permanen (beton).

Anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 3,7 miliar. "Kami sudah rancang jembatan kayu itu bakal diganti dengan jembatan permanen. Tetapi dikerjakan tahun 2016," kata Wabup Sukerana saat bertatap muka dengan

masyarakat Sidemen, belum lama ini.

Beberapa warga di sana mengaku kecewa. "Saya kira bisa diperbaiki tahun ini. Nanti tahun depan gagal tender lagi, gimana?" ujar sekelompok warga saat hadir dalam pertemuan itu.

Para pedagang di Pasar Umum Sidemen juga mengaku kecewa. Sejumlah turis asing yang mengendarai mobil, terpaksa harus gigit jari, dan berbalik arah, setelah melihat langsung jembatan tersebut ambruk.

Seperti diberitakan, jembatan kayu sepanjang 34 meter dengan lebar sekitar tiga meter ambruk, Minggu (14/6) lalu. Penyebabnya, truk bermuatan pasir melebihi tonase memaksakan melintasi jembatan tersebut. Sehingga jembatan kayu langsung ambruk ke dasar sungai berikut truknya. Sementara sopirnya langsung kabur, karena tak mau bertanggung jawab. Sehari setelah kejadian itu, truk dengan DK 9931 HD itu sudah berhasil dievakuasi. Sehingga saat ini yang tertinggal hanya rangka jembatan di dasar sungai. (kmb31)



## Dipertanyakan, Penyertaan Modal PDAM Rp 2,4 M

Amlapura (Bali Post) -

Penyertaan modal kepada PDAM Karangasem senilai Rp 2,4 miliar dipertanyakan kalangan dewan. Pasalnya, penyertaan modal itu sudah dilakukan dua kali dalam setahun. Sementara peruntukannya tidak jelas.

Legislator PDI-P I Nyoman Winata mengatakan hal itu, Senin (29/6) kemarin, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI-P terhadap tiga ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Antara lain soal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggota 2014, Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Karangasem, dan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Karangasem Sejahtera. Pascamenerima tiga ranperda ini pada 23 Juni lalu, pihaknya sudah mendalami isi ketiganya. Tidak hanya penyertaan modal kepada PDAM Karangasem, kebijakan serupa pada PT Karangasem Sejahtera juga dipertanyakan peruntukannya.

Sesuai dengan hasil verifikasi Provinsi Bali, pada saat ranperda ini dibuat, disarankan melakukan revisi untuk penambahan pasal, tetapi tidak dilaksanakan. Namun, pada pengajuan ranperda ini sudah ada penyertaan modal. "Perlu dijelaskan lebih detail, penyertaan modal kepada PT Karangasem Sejahtera ini sebesar Rp 40 juta," katanya.

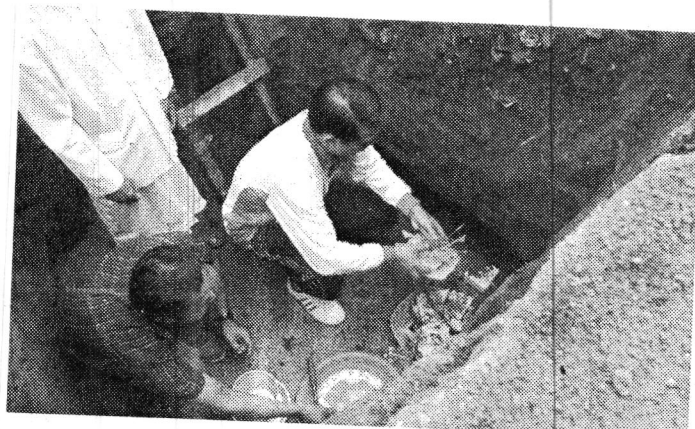
Legislator lainnya dari Partai NasDem I Kadek Sujanayasa juga meminta Ranperda Penyertaan Modal PDAM Tahun 2015 sebesar Rp 2.478.010.016,49 itu harus dijelaskan lebih detail peruntukan dan penempatan penyertaan modal daerah tersebut. Baik yang telah terealisasi sebelumnya maupun yang akan ditempatkan mendatang dalam pengelolaan Perusahaan Air Minum Kabupaten Karangasem. Sehingga secara maksimal dapat berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat Karangasem.

Terhadap Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT Karangasem Sejahtera, Kadek Sujanayasa juga memberikan beberapa catatan. Pertama, sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011, dengan pihak ketiga mana sajakah yang telah diajak bekerja sama, baik dalam pendirian perseroan ini maupun dalam sistem operasi pada kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2015. Pihaknya juga meminta penjelasan secara detail mengenai bidang usaha perseroan ini yang telah dijalankan, serta perkembangan dari awal pendirian sampai pertengahan 2015.

Bupati Karangasem Wayan Geredeg mengatakan akan menanggapi seluruh pertanyaan fraksi di DPRD Karangasem melalui sidang paripurna. Namun, sepintas dia menegaskan setiap pelimpahan pekerjaan, baik bantuan pusat maupun provinsi ke PDAM, bentuknya tentu adalah penyertaan modal. "Tidak semata-mata uang yang diserahkan, tetapi pekerjaan itu ya berupa modal secara administrasi," kata Geredeg. (kmb31)



## *Direhab, Layanan Puskesmas Pindah ke Kantor Perbekel Tusan*



**REHAB - Peletakan batu pertama menandai dimulainya proyek rehab total Puskesmas Banjarangkan I. Selama pembangunan, pelayanan dilakukan kantor Perbekel Tusan.**

Bali Post/dwa

### **Semarapura (Bali Post) -**

Proyek rehab total Puskesmas Banjarangkan I yang dianggarkan Rp 2,5 miliar mulai dikerjakan awal Juni ini. Pembangunan yang direncanakan selesai akhir tahun ini akan menambah fasilitas ruang bersalin untuk pasien yang dapat bersalin normal tanpa operasi. Selama pengerjaan dilakukan, pelayanan Puskesmas Banjarangkan I menempati sebagian bangunan Kantor Perbekel Tusan yang berada di sebelah barat Puskesmas Banjarangkan I.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Klungkung Putu Winastra mengun-

kapkan Puskesmas Banjarangkan I akan dilengkapi ruang persalinan. Penambahan fasilitas ruang persalinan diharapkan dapat mengoptimalkan layanan puskesmas kepada masyarakat.

Pengerjaan rehab berat atau total Puskesmas Banjarangkan I menggunakan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) pusat dan dana pendampingan APBD II tahun 2015 dengan total sebesar Rp 2,5 miliar lebih.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menyampaikan dengan dilakukannya pembangunan Puskesmas Banjarangkan I ini nantinya pelayanan

puskesmas khususnya di Banjarangkan bisa menjadi pusat pelayanan tingkat pertama kepada masyarakat. Dengan dibangunnya gedung baru dan beroperasi dengan baik, ia berharap pelayanan di rumah sakit bisa terbagi ke masing-masing kecamatan. Dengan ini, rumah sakit tidak selalu penuh dengan pelayanan yang seharusnya bisa dilakukan di puskesmas. Peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Banjarangkan I ini dilaksanakan Bupati Suwirta didampingi Camat Banjarangkan, Komang Gede Wisnuadi dan jajaran Puskesmas Banjarangkan I. (dwa)



**Bali Post**



# Dugaan Korupsi PT Adhi Karya Kontraktor BUMN Berikan Kontraktor Kalah Tender Rp 50 Juta

Denpasar (BaliPost) -

Pengakuan sungguh mencengangkan disampaikan saksi dalam sidang dugaan korupsi PT Adhi Karya dengan terdakwa mantan Kepala Divisi Kontruksi VII PT Adhi Karya wilayah Bali, NTB, NTT dan Maluku, Imam Wijaya Santosa. Dari pengakuan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (29/6) kemarin, kontraktor "pelat merah" atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu memberikan uang Rp 50 juta untuk kontraktor peserta tender yang kalah.

Miris memang. Pemberian uang buat pengusaha kaya itu untuk menghindari sanggahan yang diajukan peserta tender. Jaksa penuntut umum (JPU) Wayan Sutarjana dkk. kemarin menghadirkan empat orang saksi. Di depan majelis hakim diketuai Cening Budiana, saksi yang memberikan keterangan adalah Basri Iraningsih selaku Manajer Administrasi Keuangan Adhi Karya. Kedua adalah Budi Yuwono, kontraktor yang menjadi Dirut Bumi Rejo. Ketiga, Hetty Panjaitan selaku karyawan PT Suburo Jayana Indah Corp. dan terakhir Haryo Satoto, juga karyawan PT Suburo Jayana Indah Corp.

Saksi yang banyak mengungkap soal pemberian uang Rp 50 juta pada peserta tender yang kalah itu adalah Budi Yuwono. Namun, pascakasus ini dibidik Kejaksaan Agung, dia sudah mengembalikan uang itu melalui Kejaksaan Agung. Uang diberikan ke peserta lelang kalah saat proyek sudah terlaksana 30 persen. Alasannya adalah pembagian keuntungan.

Saksi pertama yang dimintai keterangan adalah Iraningsih. Pada pokoknya, dia mengatakan bahwa dalam mengelola keuangan Adhi Karya, tidak boleh membuat rekening pribadi. "Boleh saja ada rekening lain, namun itu untuk kepentingan proyek. Dan itu pun harus ada izin," tandas Ira.

Dia mengaku tahu ada rekening PT Adhi Karya masuk rekening pribadi terdakwa dari jaksa penyidik. Walau sebagai *manager*, dia mengaku tidak tahu dan tidak mengerti adanya penyimpangan, terkait dengan uang yang digunakan terdakwa. Selain itu, saksi juga mengungkap soal adanya uang transportasi Rp 5 juta selain THR yang didapat.

Sedangkan saksi Hetty mengaku pernah bertemu terdakwa di Lantai 6 Bank Mandiri, Kemayoran, Jakarta. Dia mengaku disuruh bosnya bernama Iwan. Dan ternyata, bahwa pihak Adhi Karya memberikan uang Rp 50 juta karena perusahaan tempat Hetty bekerja kalah tender. Namun, lanjut Hetty, ketika uang sebetulnya akan diberikan ke Iwan, Iwan menolaknya. "Kemudian saya disuruh berikan ke Frangki," jelas saksi.

Budi menambahkan, bahwa dia juga dapat Rp 50 juta dan diberikan di rumahnya. "Saya ikut tender proyek Tohpati-Kusamba," jelasnya. Dia cukup blak-blakan ngomong karena dia tau bahwa semestinya yang menjadi pemenang bukanlah Adhi Karya. Bahkan, selisih penawarannya mencapai Rp 20 miliar. "Kalau saya jahil, bisa terbongkar semuanya. Karena ada pemenang tender yang cacat, seperti kurangnya pengalaman," bebernya.

Kala itu, tidak dilakukan sanggahan karena kalau menyanggah

harus menyertakan jaminan 1 persen. "Tetapi saya tegaskan dan ada kuitansinya, saya sudah mengembalikan uang itu setelah tiga kali diperiksa kejaksaan," sambungnya.

Mereka yang ikut lelang saat itu ada 10-11 perusahaan. "Perkiraan saya dan menurut cerita, dapat bagian semua. Karena saat dikasih, masih banyak uang (tersisa) dalam tas," katanya yang diperkuat pernyataan saksi Hetty.

Saksi kemudian ditanya, apakah lazim seperti itu (peserta kalah tender malah diberikan uang Rp 50 juta)? Dalam kesaksiannya, bahwa itu merupakan solidaritas antarkontraktor. "Ini katanya solidaritas," jawab saksi gamblang.

"Apakah pernah bertanya ke Adhi Karya, itu uang apa?" Tanya hakim. Saksi menjawab, tidak. "Namun dari informasi sesama teman, akhirnya diberi tahu bahwa uang itu adalah pembagian keuntungan dari PT Adhi Karya. Saya rasa yang lain juga terima," bongkarnya. (kmb37)



SAKSI - Terdakwa mendengarkan saksi dalam sidang dugaan korupsi tender proyek PT Adhi Karya.

Bali post/wan

Edisi : Selasa, 30 Juni 2015

Hal : 3



Izin Berakhir Hari Ini

## Harus Diturunkan, Iklan Rokok di Jalan Protokol

Gianyar (Bali Post) -

Batas waktu pemasangan iklan rokok di ruas jalan utama atau jalan protokol di Kabupaten Gianyar berakhir hari ini, Selasa (30/6). Sesuai aturan, iklan rokok, baik yang berupa reklame, baliho dan lain-lain harus segera diturunkan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Gianyar I Gede Daging, Senin (29/6) kemarin, mengungkapkan tim gabungan Satpol PP dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) telah menindaklanjuti aturan terkait larangan pemasangan iklan rokok di ruas jalan utama. Belum lama ini dilakukan penertiban terhadap sejumlah iklan rokok di ruas jalan protokol terutama menyasar iklan yang izinnya telah habis masa berlakunya.

Soal batas waktu untuk iklan rokok yang berakhir hari ini, Gede Daging menyatakan pihaknya masih harus berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya BPPT. Koordinasi menyangkut data jumlah iklan rokok di Kabupaten Gianyar khususnya yang berada di ruas jalan protokol.

Sesuai aturan, batas waktunya berakhir memang hari ini. Akan tetapi, menurut Gede Daging, untuk penurunan segala bentuk alat peraga iklan rokok di ruas jalan protokol tidak harus dilakukan hari ini juga. "Kalau besok (hari ini - red) terakhir masa berlakunya izin. Tetapi penurunannya tak mesti besok, bisa sehari setelahnya," katanya.

Lebih lanjut diungkapkannya, selama ini proses penertiban atau penurunan reklame rokok berjalan lancar. Pemilik iklan tidak ada yang mengajukan keberatan kepada pemerintah. Pada prinsipnya mereka mengaku menerima kebijakan pemerintah.

"Tidak ada yang keberatan. Dan ini patut diapresiasi. Memang untuk mewujudkan Gianyar sebagai Kabupaten Layak Anak, kebijakan

ini harus mendapat dukungan berbagai pihak. Dari sisi pemerintah, kami juga menilai, untuk apa PAD tinggi tetapi ketertiban terutama menyangkut masalah rokok tidak bisa ditangani. Hal itu justru akan membawa pengaruh negatif atau kerugian lebih besar lagi bagi daerah," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Gianyar tidak lagi menerbitkan atau memperpanjang izin segala bentuk iklan rokok yang dipasang di jalan utama atau jalan protokol Kabupaten Gianyar. Pemerintah memberikan batas hingga akhir bulan Juni.

"Kami sudah bertahap mengurangi iklan rokok, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Kami tidak lagi memperpanjang izin iklan rokok di jalan protokol. Batasnya akhir Juni ini, segala bentuk iklan rokok di jalan utama harus dibongkar," ujar Kepala Bidang Pendataan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar Komang Alit Adnyana, belum lama ini. (kmb25)



I Gede Daging



Langgar Perizinan ✓

## Video Tron Simping Lukluk Dibongkar

Mangupura (Bali Post) -

Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) Kabupaten Badung akhirnya membongkar video tron (LED TV) di Jalan Raya Lukluk-Kapal. Pembongkaran reklame yang dianggap melanggar Perda Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung ini, telah dilakukan sejak Sabtu lalu. "Kami sudah lakukan pembongkaran dari dua hari lalu (Sabtu-red). Saat pembongkaran, perlu orang yang ahli karena jangan sampai rusak," ungkap Kepala Satpol PP Badung I Ketua Martha saat diminta konfirmasinya, Senin (29/6) kemarin.

Menurutnya, pemilik reklame ini akan mengubah konsep menjadi papan *billboard* lantaran sudah mengantongi izin. "Itu mau diganti dengan *billboard* karena izinnya adalah *billboard*, bukan LED TV," ucapnya.

Sebelumnya, Martha mengatakan, ada empat video tron yang akan dibongkar selain video tron di simpang Lukluk. Hanya, pihaknya masih menunggu tenaga ahli untuk melakukan pembongkaran itu. Dari 50 *billboard* reklame yang ada di Kabupaten Badung, beberapa di antaranya masuk sebagai jenis reklame video tron. "Karena untuk pembongkaran reklame video tron tersebut memerlukan keahlian khusus dan pemilik," ucapnya.



Bali Post/eka

**RANGKA - Beberapa pengguna jalan melihat rangka bekas LED TV di perempatan Lukluk, Badung, Senin (29/6) kemarin.**

Disebutkannya, pihaknya telah banyak melakukan upaya penertiban reklame. Mulai dari yang besar hingga yang kecil. Tahun ini tim sudah berhasil membongkar 41 reklame yang besar, sementara untuk reklame sedang dan kecil sudah berhasil diturunkan 145 buah. Untuk melakukan penurunan ini, selain kendala sulit mencari pekerja yang mau membongkar *billboard* raksasa itu, hal ini juga diakibatkan anggaran untuk membongkar reklame cukup besar. Sedangkan untuk reklame yang belum disasar pembongkarnya, pihaknya akan mengajukan anggaran pembongkaran tersebut pada anggaran perubahan dalam APBD 2015 ini. (kmb27)



## Larangan Parkir Tak Digubris Dishubinfokom Pasang Rambu Tambahan

Gianyar (Bali Post) -

Belasan petugas Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom) Kabupaten Gianyar, Senin (29/6) kemarin diterjunkan di seputar Jalan Ciung Wanara. Dengan dipimpin langsung Kadishubinfokom Cokorda Gde Agusnawa, para petugas melakukan penertiban parkir sekaligus memasang rambu larangan

parkir tambahan di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari). Aksi tersebut sebagai bagian dari upaya penertiban maraknya pelanggaran di kawasan tersebut yang kerap menimbulkan kesemrawutan lalu lintas.

Cokorda Gde Agusnawa mengungkapkan, kesemrawutan lalu lintas di sepanjang Jalan Ciung Wanara, Gianyar, seringkali tak bisa dihindari. Hal



RAMBU - Petugas Dishubinfokom memasang rambu tambahan larangan parkir di depan Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar.

Bali Post/ded

Edisi : Selasa, 30 Juni 2015

Hal : 11



Sambungan - - -

ini salah satunya akibat ulah oknum masyarakat yang memarkir kendaraan di tempat terlarang. Meskipun di sepanjang Jalan Ciung Wanara telah diberlakukan larangan parkir di tepi jalan, kenyataannya ruas jalan tersebut belum bebas parkir.

"Sebenarnya sudah ada rambu larangan parkir sejak dulu, namun masyarakat tidak peduli, tetap saja memarkir kendaraan mereka di jalur tersebut," ujar Cok Agusnawa didampingi Kabid Lalu Lintas Nurwidyaswanto.

Pada kesempatan itu, pihaknya kembali memasang tanda rambu dilarang parkir yang cukup mencolok di tepi jalan. Tujuannya agar masyarakat sadar dan tak bisa memarkir kendaraan di jalur tersebut hingga rambu berikutnya. "Dengan rambu ini kami berharap masyarakat lebih sadar akan tertib parkir di jalur tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, selain menertibkan parkir di depan Kantor Kejari Gianyar, pihaknya juga melakukan sidak dan pembersihan baliho

atau *banner* yang terpasang pada tiang *traffic light* di seputar by-pass Tulikup, tepatnya di perempatan Desa Tulikup-Desa Siyut. Tujuannya selain untuk menjaga kebersihan, tertutupnya rambu akibat baliho atau *banner* dinilai dapat membahayakan pengguna jalan. "Pengendara jadi tidak jelas melihat tanda-tanda dari rambu lalin. Kami berharap agar masyarakat tidak menjadikan rambu lalu lintas sebagai media untuk memajang reklame," ujarnya. (kmb25)



*PETANI - Puluhan petani Batu Ampar mendatangi Kantor DPRD Buleleng, meminta kejelasan soal tanah Batu Ampar, Senin (29/6) kemarin.*

Bali Post/dgk

## **Petani Datangi DPRD Minta Kejelasan Status Tanah Batu Ampar**

Singaraja (Bali Post) -

Petani penggarap di Banjar Dinas Batu Ampar Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng mendatangi kantor DPRD untuk meminta kejelasan status tanah yang mereka tempati, Senin (29/6) kemarin. Mereka diterima Ketua DPRD dan sejumlah pejabat di instansi terkait.



Sambungan - -

Para petani akhirnya diajak berdialog untuk membicarakan persoalan yang terjadi di desa mereka. Pertemuan kemarin melibatkan Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Made Sudarma, S.H., S.Sos., M.Si., Asisten I Setda Pemkab Buleleng I.B. Surya Manuaba, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja Sumarjo, S.H., M.H., Kapolres Buleleng AKBP Kurniadi, S.H., S.IK., M.Si. bersama puluhan masyarakat petani penggarap.

Dikatakan Wayan Sukrada, dia memiliki tanah bersama 77 kepala keluarga (KK) lainnya secara turun-temurun sejak perabasan hutan pada 1958. Dia memiliki legalitas SK Mendagri 1982. Tahun 1990 warga diminta oleh Pemkab Buleleng meninggalkan tanah, di mana pemerintah berhak atas tanah dengan luas 45 hektar dan atas dasar HPL Nomor 1 Tahun 1976. Berikutnya Pemkab memberi HPL sebagai dasar penerbitan Hak Guna Bangunan Nomor 2 Tahun 1991 terhadap empat perusahaan untuk kepentingan pariwisata. "Tanah itu kami miliki sejak tahun 1958, dan ada bukti SK Mendagri," kata Sukrada.

Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menilai, dengan luas 45 ha tanah di Batu Ampar tercatat sebagai aset dengan dasar HPL Nomor 1 Tahun 1976, di mana penerbitan HPL berdasarkan SK Mendagri tahun 1975. Berlanjut tahun

1989 Pemkab Buleleng melalui Perusahaan Daerah (PD) Swatantra selaku pengurus dan pengelola lahan memberikan pengelolaan tanah tersebut kepada empat investor. Di antaranya, PT Prapat Agung Permai 16 hektar, PT Bali Coral Park 20 hektar, PT Aditya Raya Citra Lestari 4,5 hektar dan PT Bumi Cendana Sentosa 4,5 hektar. "Sampai saat ini HPL Nomor 1 sedang tercatat pada rekapitulasi sebagai aset daerah Pemkab Buleleng. Penerbitan HPL itu atas dasar rekomendasi pemerintah pusat melalui SK Mendagri 1975. Kemudian PD Swatantra selaku pengelola lahan menyerahkan kepada pihak ketiga yakni empat perusahaan dengan total lahan seluas 45 hektar," ucap Sutjidra.

Pertemuan tersebut mencoba menjembatani persoalan warga petani penggarap yang menuntut dilakukan pembatalan dan pencabutan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1 Tahun 1976. Kondisi itu disikapi anggota Komisi I DPRD Buleleng H. Mulyadi Putra, S.Sos. Ia mendesak Pemkab Buleleng segera membentuk tim investigasi menelusuri data tanah HPL No. 1 Tahun 1976, dan warga yang memiliki salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor SK.171/HM/DA/82. "Pemerintah semestinya membentuk tim investigasi untuk melakukan penelusuran kajian. Karena tidak mungkin ada SK Mendagri tahun 1982, kalau memang di atas tanah itu ada HPL milik Pemkab. Tujuan

investigasi untuk menjawab persoalan dan ada landasan yuridisnya. Kami sebagai anggota dewan berharap supaya ada solusi dan tidak terjadi instabilitas di masyarakat bawah," ujar Mulyadi.

Warga Batu Ampar bahkan telah berulang kali menanyakan kejelasan status tanah Batu Ampar, yang mana diklaim sebagai aset Pemkab Buleleng. Mereka belum menerima jawaban seperti apa sikap Bupati Buleleng dalam polemik tanah Batu Ampar. Apabila ternyata tanah merupakan aset Pemkab Buleleng, warga ingin melihat bukti dan akan bersikap *legowo*. Namun, HPL No. 1 Tahun 1976 diduga objeknya tidak jelas, mengingat warga petani penggarap tidak pernah melakukan pelepasan dalam bentuk apa pun. Tanah HPL No. 1 Tahun 1976/HGB No. 2 tidak memiliki bukti transaksi atau akta jual-beli. Indikasinya HPL No. 1 Tahun 1976 diperkirakan dibuat pada tahun 1990-an, bila sertifikat HPL No. 1 dimaksud dibuat tahun 1976 logonya bola dunia, bukan burung garuda. Sertifikat terbitan tahun 1976 hingga tahun 1984 berlogo bola dunia.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna meminta komunikasi yang dijalin bersama masyarakat petani Batu Ampar agar dituntaskan bersama secara benar. Pihaknya tidak ingin persoalan Batu Ampar malah menjadi komoditas politik dan rakyat justru malah tidak mendapat kebenaran atas haknya. (kmb34)



## Tahun Depan *Jembrana akan Miliki Kebun Raya*

Negara (Bali Post) -

Selain telah memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan lapangan umum, Pemkab Jembrana juga akan membangun Kebun Raya memanfaatkan areal jaba Pura Jagatnatha Jembrana. Kebun Raya yang akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat ini nantinya tidak sembarangan tanaman yang ditanam dan lebih mengutamakan tanaman endemik lokal Indonesia, Jembrana khususnya. Hal itu diutarakan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat sidak ke Pura Jagatnata, Senin (29/6) kemarin.

Pembangunan kebun raya itu akan dimulai tahun 2016 dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 4 miliar. Pemkab saat ini tengah mempersiapkan pembuatan *Design Engineering Detail* (DED). "Ini (pembangunan Kebun Raya) sudah dipastikan tahun depan. Sebenarnya kita diberi Rp 5 miliar dari Pusat, yang Rp 1 miliar dipakai Gilimanuk dan yang Rp 4 miliar untuk di sini," tandas Wabup Kembang Hartawan.

Wabup yang mengecek lokasi didampingi Kakan LHKP Jembrana I Wayan Darwin dan Deniek G Sukarya selaku konseptor dan pemerhati tanaman ini, mengatakan Kebun Raya Daerah ini jauh berbeda dengan taman. Karena jenis pohon yang ditanam itu mengutamakan tanaman

endemik. Program ini didorong bisa di daerah-daerah melalui Badan Pengembangan Kebun Raya Daerah di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain berfungsi sebagai ruang hijau, Kebun Raya ini juga berfungsi sebagai pusat penelitian di samping fungsi rekreasi dan edukasi.

Deniek memaparkan konsep yang dibangun tidak mengesampingkan fungsi Pura Jagatnata itu sendiri. "Konsep kita buat alami Bali dan diutamakan tanaman-tanaman endemik Bali, Indonesia dan tanaman untuk keperluan upacara, tidak terlalu banyak tanaman asing," tandas Deniek. Sangat disayangkan, Pura Jagatnata yang cukup megah namun di bagian jaba pura tidak terlalu terawat. Pembangunan mengambil konsep alami tanpa menebang tanaman yang sudah ada.

Begitu juga lampu-lampu yang menghiasi selama ini juga akan disesuaikan agar tidak menghilangkan sifat alami. Termasuk areal kolam yang dari beton juga diganti batu kali. Selain itu juga akan ada tambahan areal di belakang Pura Jagatnata Jembrana. "Saat ini areal yang kita miliki 5,8 hektar. Rencana nanti akan kita tambah, dan kita tambah pendanaan melalui APBD II (Jembrana) dengan persetujuan dari Dewan," tukas Wabup Kembang. (ad4346)



## Verifikasi Rampung ✓ Dana Desa Ditransfer ke Rekening Desa

### Tabanan (Bali Post) -

Alokasi dana desa mulai ditransfer ke rekening desa. Di Tabanan, pencairan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut dalam waktu dekat ini akan diluncurkan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wisryastuti. "Tahapan verifikasi APB-Des sudah rampung, dana desa segera ditransfer," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) I Gusti Ngurah Supanji, Senin (29/6) kemarin.

Mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan ini menambahkan, untuk alokasi dana desa memang sudah ditransfer ke rekening desa, sementara dana alokasi daerah (DAD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) memang belum sepenuhnya diterima oleh desa.

Salah seorang perbekel di wilayah Kecamatan Tabanan saat dikonfirmasi juga membenarkan jika pihaknya telah menerima kucuran dana yang telah masuk ke rekening desa. "Kurang lebih dua hari lalu kami terima, tapi itu baru sebagian. Dari informasi yang saya terima, dananya akan dikucurkan bertahap," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun ini dana desa telah dicairkan oleh pemerintah pusat untuk 636 desa dinas di Bali. Kabupaten Tabanan mendapatkan alokasi tertinggi yakni Rp 37,06 miliar untuk 133 desa. Untuk bisa mendapatkan alokasi dana tersebut pihak desa pun diwajibkan membuat APBDes yang selanjutnya diverifikasi oleh BPMPD.

Setelah dianggap layak, barulah dana tersebut ditransfer ke rekening desa. Nominal dana yang masuk di masing-masing desa pun beda-beda. Dijelaskan Supanji, ada enam sumber dana yakni bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan bersifat khusus kabupaten dan provinsi dan dana desa pusat. (kmb28)